

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia salah satu Negara dengan iklim tropis dan rentan terhadap perubahan iklim yang sangat parah yang berujung ke pemanasan global, perubahan iklim berfokus pada pola suhu dan cuaca jangka panjang perubahan iklim juga dapat digolongkan sebagai perubahan suhu yang tiba-tiba, pola curah hujan dan cuaca, angin dan lain sebagainya. Menurut Mtsweni perubahan iklim merupakan kondisi berubahnya suhu temperatur dan distribusi curah hujan yang membawa dampak secara luas terhadap berbagai bidang kehidupan manusia. faktor penyebab perubahan iklim antara lain, dampak gas rumah kaca, Pemanasan global, menipisnya lapisan Ozon, dan rusaknya fungsi hutan. Perubahan iklim dalam jangka panjang akan menimbulkan dampak negatif seperti banjir, kekeringan berkepanjangan, tanah longsor, dan kebakaran hutan.¹

Berubahnya iklim akan terus mempengaruhi pada suatu ekosistem dan akan berdampak kepada seluruh manusia. Dengan adanya perubahan iklim maka akan menimbulkan suatu resiko besar bagi kesehatan manusia, terutama akan berdampak pada pangan serta akan berdampak terhadap pembangunan ekonomis (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan iklim dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor seperti suhu udara, radiasi matahari, kecepatan angin, dan curah hujan. Suhu permukaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pengaruh radiasi matahari yang diterima, pengaruh dari darat dan juga

¹ Siregar, A. S. (2024). *Pelaksanaan program kampung iklim (ProKlim) oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Pekanbaru*. (Skripsi, Universitas Lancang Kuning).

laut, panas yang signifikan, tutupan lahan ditinjau dari jenis tanah, dan pengaruh sudut datangnya sinar matahari.²

Menurut laporan International Panel Climate Change (IPCC) yang diliris di Jenewa, Swiss menyebutkan peluang dunia untuk membatasi pemanasan global sekitar 1,5°C sangatlah kecil. Untuk mencegah kenaikan suhu bumi mencapai 1,5°C pada tahun 2030, emisi gas rumah kaca harus mencapai puncaknya paling lambat sebelum tahun 2025 dan berkurang sebesar 43% pada tahun 2030. International Panel Climate Change (IPCC) juga menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan tantangan global yang dampaknya dirasakan oleh manusia di berbagai penjuru dunia. Dampak tersebut mencakup kenaikan permukaan air laut, pencairan es di wilayah kutub, peningkatan frekuensi kebakaran hutan, penyebaran wabah penyakit, serta munculnya badai dan cuaca ekstrem (Internatinonal Panel Climate Chage).³

Berdasarkan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berlingkup nasional dalam rangka mendorong masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal dalam meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan penerapan Program Kampung Iklim (ProKlim) berdasarkan aksi adaptasi dan mitigasi serta dukungan kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Kegiatan Program Kampung Iklim (ProKlim) dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman

² Ibid, hlm 1-2

³ Pulungan, M. S., Hadinugroho, D. L., & Slamet, B. (2024). Strategi Pengembangan Program Kampung Iklim di Desa Sidodadi Ramunia. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 1-13.

masyarakat mengenai perubahan iklim dan dampak yang terjadi pada kesehatan masyarakat yang ditimbulkan.⁴

Untuk menghadapi perubahan iklim diperlukan langkah atau rencana yang efektif dalam mengurangi atau mencegah dampak yang mungkin terjadi yaitu dengan membentuk Program Kampung Iklim (Proklam) yang ditetapkan sebagai gerakan nasional sekaligus bentuk komitmen pemerintah dalam pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat di tingkat lokal. Program ini menargetkan pembentukan 20.000 kampung iklim pada tahun 2024. Namun, berdasarkan data hingga tahun 2021 jumlah Proklam yang terdaftar dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) baru mencapai 3.270 lokasi, sehingga masih dibutuhkan tambahan 16.730 kampung iklim untuk mencapai target tersebut.

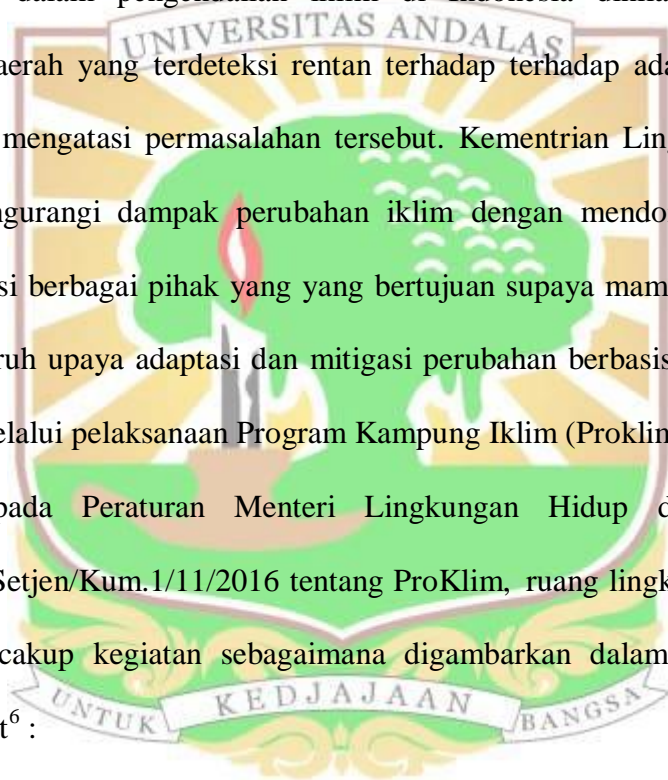
Proklam yang diperkenalkan pada tahun 2011 memiliki dasar hukum pelaksanaan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 mengenai Program Kampung Iklim. Pada tahun 2015 terjadi penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dan peraturan yang menggantikannya disahkan melalui Peraturan Menteri LHK No P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim. Peranan Proklam sebagai program ketahanan iklim di tingkat lokal sangat krusial untuk dipantau secara seksama. Hal ini penting karena Proklam merupakan bagian integral dari kebijakan transisi Indonesia menuju masa depan yang rendah emisi

⁴ Furqan, M. H., Azis, D., & Wahyuni, R. (2020). Implementasi program kampung iklim (proklam) di gampong Lambung kecamatan Meuraxa kota Banda Aceh. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, 5(2).

dan beradaptasi dengan iklim sesuai dengan dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia. Selanjutnya, untuk memberikan panduan teknis kepada semua pihak yang terlibat dalam Proklam, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim menerbitkan Peraturan Dirjen PPI No. P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 mengenai Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim.

Upaya dalam pengendalian iklim di Indonesia dinilai sangat perlu terutama di daerah yang terdeteksi rentan terhadap adanya perubahan iklim. Dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup berupaya mengurangi dampak perubahan iklim dengan mendorong kemitraan serta kolaborasi berbagai pihak yang bertujuan supaya mampu memperkuat kapasitas seluruh upaya adaptasi dan mitigasi perubahan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklam).⁵

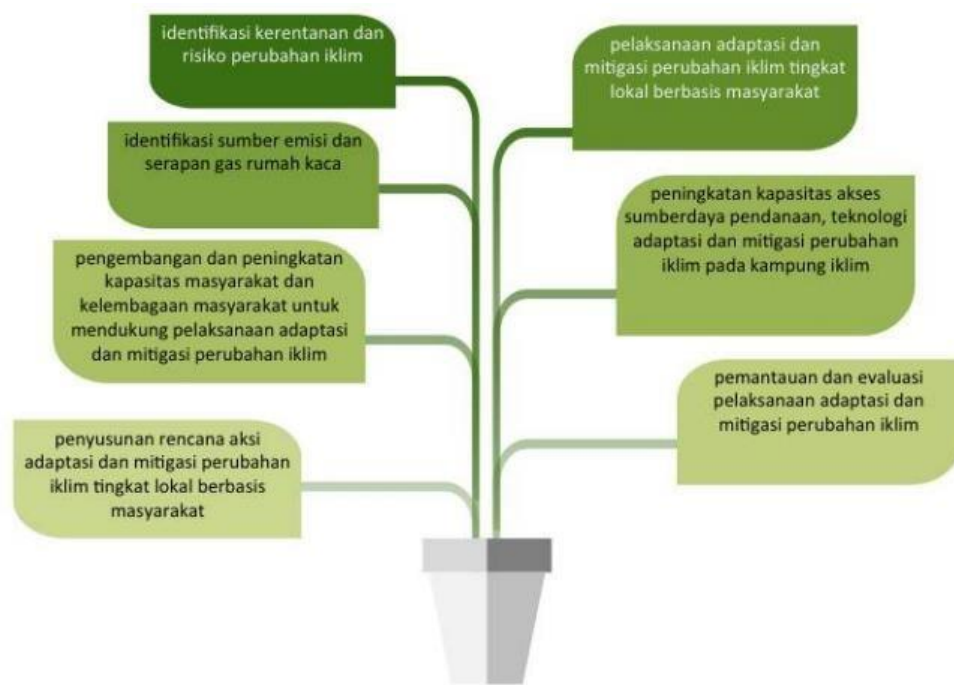
Mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang ProKlim, ruang lingkup pelaksanaan ProKlim mencakup kegiatan sebagaimana digambarkan dalam diagram pada gambar berikut⁶ :



⁵ Ismiartha, G. R., Santoso, R. S., & Hanani, R. (2021). Analisis stakeholders dalam kegiatan pengelolaan sampah program kampung iklim (proklam) sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dusun soka, desa lerep, kecamatan ungaran barat, kabupaten semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(2), 86-103.

⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Roadmap Program Kampung Iklim (ProKlim)*.

Gambar 1.1 Ruang Lingkup Program Kampung Iklim



Sumber: road map program kampung iklim (ProKlim) 2017

Berdasarkan Gambar 1.1 tersebut menggambarkan tahapan strategis dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) yang diilustrasikan melalui bentuk tanaman sebagai simbol pertumbuhan dan keberlanjutan. Proses dimulai dengan identifikasi kerentanan dan risiko perubahan iklim, serta pemetaan sumber emisi dan serapan gas rumah kaca sebagai dasar penyusunan rencana aksi. Selanjutnya, dilakukan pengembangan kapasitas masyarakat dan kelembagaan agar mampu melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara efektif. Tahap berikutnya mencakup perumusan rencana aksi berbasis masyarakat, pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi di tingkat lokal, serta peningkatan akses terhadap pendanaan, teknologi, dan sumber daya pendukung. Terakhir, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan keberlanjutan serta

efektivitas program. Narasi ini menunjukkan bahwa ProKlim merupakan upaya sistematis dan partisipatif yang mengintegrasikan aspek identifikasi, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi dalam rangka mewujudkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

Program kampung iklim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong masyarakat untuk melakukan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.⁷ Program Kampung Iklim ini mendorong kerjasama gabungan antar pihak untuk memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak berbasis komunitas melalui pelaksanaan Program Kampung Iklim (PROKLIM). Manfaat program kampung iklim memiliki manfaat sosial, ekonomi, lingkungan pengurangan resiko iklim dengan keberlanjutan pada penguatan data pengendalian perubahan iklim dan pengembangan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim.

Proklam adalah inisiatif nasional yang fokus pada pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal dengan pendekatan berbasis komunitas di Indonesia.⁸ Program ini merupakan upaya sinergi antara aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat nasional, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta pihak terkait lainnya, guna memperkuat kapasitas adaptasi dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Saat ini sudah ada sekitar 3.000 desa yang telah mengimplementasikan Proklam di seluruh Indonesia.

⁷ <https://kemenlh.go.id>

⁸ <https://direktoripb.bnpb.go.id>

Tabel 1. 1 Kategori Pembinaan Provinsi

No	Provinsi
1.	Sumatera Barat
2.	Sumatera Selatan
3.	Jambi
4.	Jawa Barat
5.	Jawa Tengah
6.	Jawa Timur
7.	Kalimantan Timur
8.	Kalimanta Selatan
9.	Sulawesi Barat
10	Sulawesi Selatan

Sumber :<https://dlh.sumbarprov.go.id/details/news/1181>

Berdasarkan tabel 1.1 yang menunjukkan bahwa beberapa provinsi mendapatkan perhatian khusus dari KLHK, Provinsi-provinsi tersebut dianggap memiliki potensi besar, jumlah lokasi proklamasi yang tinggi, atau tantangan lingkungan yang signifikan sehingga memerlukan pembinaan Program Kampung Iklim (ProKlim) dan menunjukkan konteks nasional ProKlim bahwa ProKlim bukan hanya program lokal atau kabupaten, tetapi program skala nasional yang dilaksanakan dengan sistem pembinaan bertingkat. Dalam tabel tersebut, Sumatera Barat berada pada urutan pertama, artinya Provinsi dianggap penting dan aktif dalam pengembangan ProKlim sehingga mendapat pembinaan langsung dari

pemerintahan pusat dan dapat memberikan dorongan kuat dari provinsi dan pusat agar Kabupaten/Kota meningkatkan kontribusi terhadap adaptasi dan mitigasi iklim.

Program kampung iklim (Proklam) mengusung konsep pemberdayaan masyarakat (*Community Based Development*). *Community Based Development* adalah pendekatan pembangunan yang menempatkan komunitas lokal sebagai pusat dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan. Dalam pendekatan ini, anggota masyarakat aktif berperan serta dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kebutuhan dan potensi mereka sendiri. Melalui program ini masyarakat bersama lembaga terkait berperan aktif dalam memobilisasi dan mengelola sumber daya manusia dan alam, baik yang ada di dalam desa maupun di luar desa. Semua kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas dalam pengendalian perubahan iklim terus didorong agar dapat berkembang dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin dihadapi masyarakat di masa mendatang akibat perubahan iklim. Pemahaman mengenai tingkat kerentanan, proyeksi dampak dan proyeksi iklim seiring dengan meningkatnya suhu permukaan bumi perlu ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar masyarakat mampu memilih aksi adaptasi yang tepat untuk meningkatkan ketahanan mereka dalam menghadapi perubahan iklim.⁹

Perubahan iklim dapat menimbulkan risiko besar bagi kesehatan manusia, keamanan pangan, dan pembangunan ekonomi. Salah satu strategi Kementerian

⁹ Ramdani, J., & Resnawaty, R. (2021). Kolaborasi multi pihak pada program kampung iklim di Kabupaten Cilacap. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(2), 191-198.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam upaya pengendalian perubahan iklim adalah dengan mendorong kerja sama multi pihak untuk memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak berbasis komunitas melalui pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim).

Melalui ProKlim, pemerintah memberikan penghargaan terhadap masyarakat lokal yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Pelaksanaan ProKlim mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim. ProKlim dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah minimal setingkat Dusun/Dukuh/RW dan maksimal setingkat Desa/Kelurahan atau yang dipersamakan dengan itu.¹⁰

Tujuan dari program kampung iklim (ProKlim) adalah sebuah program berlingkup nasional dan dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong partisipasi masyarakat, karena isu lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi atau perusahaan aja tapi harus mencakup seluruh stakeholders dalam melaksanakan aksi kecil untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta pengurangan emisi gas efek rumah kaca. Kegiatan adaptasi perubahan iklim akan diterapkan dan tentunya beragam dan berbeda-beda tergantung potensi dan kondisi di wilayah tersebut. Program ini mendorong kreativitas masyarakat sehingga warga dapat mencari alternatif pemecahan masalah yang mudah dilakukan secara swadaya, selaras dengan kemauan stakeholders terkait khususnya pemerintah dalam persoalan

¹⁰Ramdani, J., & Resnawaty, R. (2021). Kolaborasi multi pihak pada program kampung iklim di Kabupaten Cilacap. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(2), 191-198.

masyarakat tentang isu lingkungan lalu dapat berkerjasama secara sinergi dengan masyarakat setempat.¹¹

Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Wilayah yang penduduknya telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan disebut sebagai lokasi Kampung Iklim (ProKlim). Istilah kampung dalam konteks ini merujuk pada wilayah administratif yang dapat berupa rukun warga, dusun atau dukuh, kelurahan atau desa, maupun wilayah administratif lain yang setara. Penetapan suatu wilayah sebagai Kampung Iklim dilakukan melalui serangkaian proses penilaian yang mengacu pada kriteria pelaksanaan Program Kampung Iklim sesuai pedoman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dalam pengimplementasian program kampung iklim ini dibutuhkan koordinasi antara organisasi pemerintah daerah untuk melaksanakan proklam tersebut. Program Kampung Iklim ini menerapkan konsep pemberdayaan

¹¹ MAULA, I. (2020). Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam Program Kampung Iklim.

(*Community Based Development*), dimana kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dan institusinya dalam mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam di dalam desa maupun yang di luar desa diarahkan untuk memperkuat upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Koordinasi dalam sebuah organisasi itu memiliki peranan yang sangat penting agar dalam setiap kegiatan tercapainya produktivitas, efisiensi dan efektifitas. Dalam suatu organisasi setiap pemimpin harus mampu mengkoordinasikan kegiatan anggota untuk menyelesaikan tugas.

Koordinasi ialah salah satu cara yang sangat efektif untuk dilakukan dalam mengkomunikasikan berbagai hal yang telah direncanakan sebelumnya, rencana yang telah dilaksanakan atau bahkan yang telah dievaluasi, karena yang paling penting dalam mencapai suatu tujuan adalah koordinasi yang efektif tersebut. Koordinasi diperlukan dalam semua hubungan kerja dalam suatu organisasi. Tanpa koordinasi setiap anggota organisasi tidak memiliki kendali terhadap penetapan tujuan, sehingga berdampak negatif pada organisasi itu sendiri.¹²

Organisasi dan koordinasi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Koordinasi memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kelancaran operasional suatu organisasi, terutama ketika organisasi tersebut beroperasi sebagai sistem. Setiap bagian atau unit dalam organisasi harus bekerja sejalan sebagai bagian dari sistem tersebut, walaupun mereka memiliki fungsi masing-masing. Oleh karena itu, sebuah unit tidak dapat beroperasi secara optimal tanpa dukungan dari unit lain atau antar unit dalam organisasi. Inilah mengapa

¹² Handoko, T. Hani. (2016). *Manajemen*. Yogyakarta: BPF.

koordinasi sangat penting dalam konteks sebuah organisasi, karena berperan sebagai penghubung yang mengantarkan kesuksesan menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.¹³

Program Kampung Iklim (ProKlim) telah diimplementasikan oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaannya diperkuat melalui Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 660/01/SE/DLH-2018 mengenai Pembentukan Kampung Iklim di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut. Hingga tahun 2020–2021, sebanyak 34 lokasi Kampung Iklim telah terdaftar dalam Sistem Registrasi Nasional (SRN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rincian usulan lokasi tersebut disajikan sebagai berikut.

Tabel 1.2 Lokasi Proklim Tahun 2020 dan 2021 Provinsi Sumatera Barat

No	Lokasi Usulan	Alamat	Kab/Kota
1	Jor. Piruko Tengah Nagari Sitiung	Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya	Kab. Dharmasraya
2	Jor. Kota Hilalang Nagari Sungai Langkok	Kec. Tiumang Kab. Dharmasraya	Kab. Dharmasraya
3	Jor. Ganting Nagari Sirukam	Kec. Payung Sekaki Kab. Solok	Kab. Solok
4	Jor. Tabek Nagari Talang babungo	Kec. Hiliran Gumanti Kab. Solok	Kab. Solok
5	Jor. Dahlia Nagari Lubuk Jantan	Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar	Kab. Tanah Datar
6	Jor. Koto Laweh Nagari Tanjung Alam	Kec. Tanjung Baru Kab. Tanah Datar	Kab. Tanah Datar
7	Jor. Tanjung Harapan Nagari Palangki	Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung	Kab. Sijunjung

¹³ ibid

8	Jor. Koto Baru Nagari Tanjung Bonai Aur	Kec. Sumur Kudus Kab. Sijunjung	Kab. Sijunjung
9	RT. 2, 6, 9, 10 Kelurahan Ekor Lubuk	Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang	Kota Padang Panjang
10	RT. 8, 10, 11, 12 Kelurahan Pasar Usang	Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang	Kota Padang Panjang
11	Kor. Koto Tinggi Nagari Gunung Padang Alai	Kec. V Koto Timur Kab. Padang Pariaman	Kab. Padang Pariaman
12	Kor. Ringan Ringan Nagari Pakandangan	Kec. Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman	Kab. Padang Pariaman
13	Jor. Padang Japang Nagari VII Koto Talago	Kec. Guguak Kab. 50 Kota	Kab. Limapuluh Kota
14	RW 02 Kelurahan Kubu Gulai Banchah	Kec. Mandiingin Koto Selayar Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi
15	RW 02 Kelurahan Kototuo Limo Kampung	Kec. Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh
16	Kp. Laban Nagari Salido	Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan
17	Kp. Alai Nagari Limau Gadang Lumpo	Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan
18	Jorong Padang Galanggang Nagari Matua Mudiak	Kec. Matur Kab. Agam	Kab. Agam
19	Jorong Tanjung Alam Nagari Kumanis	Kec. Sumpur Kudus Kab. Sijunjung	Kab. Sijunjung
20	Jorong Bukit Buar Nagari Paru	Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung	Kab. Sijunjung
21	Jorong Koto Nagari Guguak	Kec. Koto VII Kab. Sijunjung	Kab. Sijunjung
22	Korong Matua Nagari Sikucua	Kec. V Koto Kampung Dalam	Kab. Padang Pariaman
23	Jorong Pagu-Pagu Nagari Pandai Sikek	Kec. X Koto Kab. Tanah Datar	Kab. Tanah Datar

24	Jorong Baringin Nagari Batu Taba	Kec. Batipuh Selatan Kab. Tanah Datar	Kab. Tanah Datar
25	Kampung Salido Kecil Nagari Salido Sari Bulan	Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan
26	RT. 3, 5, 6, 8 Kelurahan Bukit Surungan	Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang	Kota Padang Panjang
27	Dusun Kajai Desa Kajai	Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman	Kota Pariaman
28	RW. 06 Kelurahan Kuranji	Kec. Kuranji Kota Padang	Kota Padang
29	Jorong Ganting Nagari Sirukam	Kec. Payung Sekaki Kab. Solok	Kab. Solok
30	Jor. Karya Muda Timur Nagari Sungai Duo	Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya	Kab. Dharmasraya
31	Jorong Kampung Tengah Nagari Simalidu	Kec. Koto Salak Kab. Dharmasraya	Kab. Dharmasraya
32	RW. 3 Ngarai Saiyo Kelurahan Kayu Kubu	Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi
33	RW. 01 Kelurahan Parit Antang	Kec. Aua Birugo Tiga Baleh Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi
34	Jor. Padang Japang Nagari VII Koto Talago	Kec. Guguak Kab. 50 Kota	Kab. Limapuluh Kota

Sumber: Sistem Registrasi Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020 dan 2021

Bedasarkan Tabel 1.2 di atas dapat dilihat jumlah lokasi ProKlim di Provinsi Sumatera Barat sudah mencapai 34 lokasi pada tahun 2020 dan 2021. Lokasi-lokasi tersebut mencakup beragam wilayah mulai dari jorong, korong, kampung, hingga RT/RW yang menunjukkan bahwa program tidak hanya menjangkau wilayah administratif besar, tetapi juga unit terkecil masyarakat. Penyebaran yang merata ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui pengelolaan

sumber daya alam, pengurangan risiko bencana, serta peningkatan ketahanan lingkungan di tingkat komunitas.

Salah satu daerah yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah yang termasuk melaksanakan Program Kampung Iklim ini. Pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Tanah Datar tidak dapat menghindari kebutuhan untuk berkoordinasi antara berbagai lembaga di tingkat daerah termasuk pemerintah Kabupaten Tanah Datar sendiri.

Di Kabupaten Tanah Datar, pelaksanaan ProKlim berada di bawah koordinasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. yang memiliki peran penting dalam merancang strategi, mengimplementasikan program, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan. Namun, pada praktiknya, pelaksanaan ProKlim masih menghadapi berbagai kendala. Masalah utama dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kabupaten Tanah Datar, seperti program serupa di daerah lain, kemungkinan meliputi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perubahan iklim dan ProKlim, kesulitan dalam mobilisasi partisipasi masyarakat, serta tantangan dalam mengintegrasikan praktik lokal untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Landasan hukum di tingkat Kabupaten Tanah Datar ini tidak ditemukan peraturan daerah khusus yang mengatur Program Kampung Iklim (ProKlim) secara eksplisit, terdapat sejumlah regulasi yang mendukung pelaksanaan prinsip dan kebijakan Program Kampung Iklim (ProKlim) yaitu sebagai berikut :

1. Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah: Memuat kewajiban pemerintah daerah dan nagari, serta pengaturan bank sampah, peran masyarakat, kebijakan insentif/disinsentif, dan sistem pengelolaan sampah komponen penting dalam mitigasi GRK.
2. Perbup Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Persampahan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup: Memperkuat keberadaan kelembagaan teknis di daerah yang menjadi ujung pelaksanaan ProKlim secara operasional.
3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS): Tanah Datar telah melakukan sosialisasi dan konsultasi publik KLHS dalam penyusunan RPJMD 2021–2026 dan 2025–2029, sebagai respon terhadap kewajiban yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No. 46 Tahun 2016. KLHS memastikan pembangunan daerah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang sejalan dengan semangat ProKlim.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2020-2024, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2020- 2024 yang akan diusung, adalah¹⁴ :

- a. Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian

¹⁴ Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021–2026.

pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;

- b. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species;
- c. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya. Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2020-2024. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 68,71- 69,24
2. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan, Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung

pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).

Berkaitan dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar melaksanakan kegiatan dengan sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah membuat program iklim di Kabupaten Tanah Datar. Saat ini terdapat lima lokasi yang melaksanakan program kampung iklim yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3 Jumlah Lokasi ProKlim di Kabupaten Tanah Datar per Tahun (Hingga 2025)

Tahun	Lokasi ProKlim di Tanah Datar
2016	2 lokasi : Jorong Gudam (Pagaruyung), Jorong Tarok (Tanjung Alam)
2017	2 lokasi penghargaan : Jorong Jirek (Andaleh), Jorong Labu Atan (Sungai Jambu)
2022	1 lokasi penghargaan : Jorong Batu Kadurang (Andaleh)
2023	Beberapa lokasi bersertifikat termasuk Nagari Padang Laweh Malalo (Batipuh Selatan)
2025	1 lokasi diverifikasi sebagai ProKlim Lestari : Nagari Andaleh (Batipuh)

Sumber: Tanah Datar.go.id

Bedasarkan Tabel 1.3 di atas menjelaskan Secara keseluruhan, mulai dari tahun 2016 hingga 2025, Kabupaten Tanah Datar telah memiliki sedikitnya 5 lokasi ProKlim yang tercatat dalam berbagai tahapan: pengusulan, verifikasi,

penghargaan, maupun sertifikasi. Tahun 2025 bahkan menjadi tonggak penting karena munculnya kategori ProKlim Lestari pertama di daerah ini, yaitu di Nagari Andaleh.

Program Kampung Iklim (Proklam) di Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, mulai mengikuti program kampung iklim (ProKlim) sejak tahun 2017 tahun ini menjadi awal proses pendampingan, pembinaan, dan pengumpulan data oleh Dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup dan dimulai dengan pencanangan sebagai Kampung Ecobrik pada 14 Desember 2022. Pencanangan ini dilakukan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, bersama Bupati Tanah Datar, Eka Putra. Nagari Andaleh dipilih karena sebelumnya telah meraih penghargaan Proklam Utama Tropi pada 2022 dan Proklam Utama Bersertifikat pada 2017. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim melalui pengelolaan sampah dan pemanfaatan lahan pekarangan. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah Ecobrik, yaitu pengolahan sampah plastik rumah tangga menjadi bahan bangunan yang ramah lingkungan. Selain itu, dibangun pula Taman Literasi Ecobrik dengan program "Sedekahkan sampahmu, baca bukumu", yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang sampah .

Kegiatan Program Kampung Iklim (Proklam) di Kabupaten Tanah Datar umumnya fokus pada pengelolaan sumber daya air, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat, yang merupakan tujuan umum dari program Proklam yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup. Contoh kegiatannya meliputi pembuatan sumur resapan, panen air hujan, pengembangan pertanian

organik, pemanfaatan lahan pekarangan, dan upaya pencegahan penyakit yang terkait dengan perubahan iklim, seperti Demam Berdarah Dengue (DBD). Di Nagari Andaleh kegiatan Proklam yang dilakukan berfokus pada upaya peningkatan ketahanan lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca, serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, yang juga menjadi ciri khas program ProKlim secara nasional.¹⁵

Nagari Andaleh memenangkan penghargaan karena melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui program Kampung Iklim (Proklam). Mereka berhasil meraih penghargaan ini melalui kegiatan pelestarian lingkungan, seperti membangun Kampung Iklim dan Ecobrick dan Taman Literasi, serta mendapatkan pengakuan dari pemerintah sebagai Kampung Iklim Lestari pertama.

Sebelum Nagari Andaleh mendapatkan penghargaan ProKlim, kondisi lingkungan masih menghadapi sejumlah tantangan. Permasalahan utama adalah pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik, yang sebagian besar belum terkelola dengan baik. Masyarakat cenderung membakar atau menimbun sampah karena keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan. Kesadaran kolektif mengenai pentingnya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim masih rendah, meskipun terdapat kelompok masyarakat yang mulai berinisiatif melakukan kegiatan penghijauan atau pengelolaan lingkungan sederhana. Program-program lingkungan hidup belum terintegrasi secara terpadu, sehingga dampaknya masih bersifat sporadis. Peran pemerintah nagari dan Dinas Perumahan Rakyat,

¹⁵ <https://dlh.sumbarprov.go.id>

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup masih pada tahap sosialisasi, dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Dengan kata lain, sebelum penghargaan ProKlim, Nagari Andaleh masih berada pada tahap awal untuk membangun sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Setelah Nagari Andaleh ditetapkan dan memperoleh penghargaan dalam Program Kampung Iklim, terjadi perubahan signifikan baik dari sisi pengelolaan lingkungan, partisipasi masyarakat, maupun pengakuan kelembagaan. Program inovatif seperti Kampung Iklim Ecobrick dan Taman Literasi berhasil mengedukasi warga sekaligus mengurangi sampah plastik dengan cara menukarkan plastik untuk bisa membaca buku. Dukungan multipihak semakin kuat, mulai dari PT Semen Padang melalui CSR yang membangun rumah kompos, Universitas Negeri Padang sebagai mitra akademik, hingga Dinas Lingkungan Hidup yang aktif melakukan pendampingan.

Gambar 1.2 Nagari Andaleh, Proklm Lestari Pertama di Tanah Datar



Sumber: Tanah Datar.go.id 2025

Berdasarkan gambar 1.2 di atas sesuai dengan pernyataan yang di sampaikan oleh Ahmad Fadly Selaku Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar yaitu

"Suatu kebanggaan bagi kami semua, bahwa penilaian Proklim Kategori Lestari merupakan yang pertama di Kabupaten Tanah Datar, sebelumnya yang tertinggi masih Proklim Kategori Utama, tentu Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Nagari Andaleh yang komit dalam Proklim ini". (hasil pernyataan wakil bupati dengan media Tanah Datar.go.id pada Hari Kamis Tanggal 19 Juni 2025).

Berdasarkan pernyataan yang dikatakan oleh Wakup Kabupaten Tanah Datar, dapat diketahui bahwa Nagari Andaleh saat ini memiliki salah satu lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim). Di mana lokasi ProKlim inilah yang menjadi perwakilan lokasi ProKlim untuk Kabupaten Tanah Datar. Untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kabupaten Tanah Datar. Wawancara dilakukan secara tatap muka di kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar serta di beberapa lokasi ProKlim. Sebagaimana menurut hasil wawancara dengan Kabid Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar yaitu Vipiet Adriani, ST sebagai berikut :

“Pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kabupaten Tanah Datar telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data hingga tahun 2025, terdapat enam lokasi yang telah melalui tahapan pengusulan, verifikasi, penghargaan, hingga sertifikasi, dengan Nagari Andaleh menjadi lokasi pertama yang diverifikasi sebagai ProKlim Lestari. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dalam mendorong upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis

komunitas”. (hasil wawancara dengan kaibid Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada pukul 10.00 WIB Hari Senin Tanggal 26 Mei 2025).

Menurut hasil wawancara di atas menjelaskan Program ini juga dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perangkat nagari, kelompok tani, dan masyarakat setempat. Dukungan masyarakat terhadap ProKlim terlihat semakin baik, meskipun masih terdapat tantangan pada penyediaan sarana pengelolaan sampah dan konservasi sumber daya air. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi yang lebih terarah, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan dukungan pendanaan untuk memperkuat pelaksanaan program di lapangan.

Pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Nagari Andaleh masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program. Sebagaimana hasil wawancara dengan Irza Fhaizati Anas, ST.MM merupakan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, sebagai berikut :

“Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Nagari Andaleh adalah minimnya anggaran yang tersedia. kebiasaan masyarakat membakar jerami pasca panen masih tinggi, sehingga apabila data dimasukkan secara apa adanya, nilainya akan rendah. Demikian pula dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang masih rendah”. (hasil wawancara dengan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan pada pukul 10.00 WIB Hari Jum’at 9 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Nagari Andaleh adalah keterbatasan anggaran yang tersedia.

Selain itu, perilaku masyarakat yang masih membakar jerami pasca panen turut mempengaruhi penilaian keberhasilan program, karena jika data dimasukkan secara apa adanya, nilai yang diperoleh akan rendah. Adapun pengelolaan sampah yang belum optimal, di mana volume sampah rumah tangga belum tercatat secara spesifik dan pemanfaatan bank sampah serta komposter belum berjalan maksimal. Sebagian masyarakat masih membakar sampah dan jerami pasca panen karena dianggap lebih praktis, sehingga berkontribusi pada emisi dan pencemaran udara. Selain itu, wilayah ini memiliki risiko bencana banjir, longsor, dan kekeringan yang cukup tinggi, terutama pada musim ekstrem yang semakin sering terjadi. Adapun Wali Nagari Andaleh yaitu Bahuri DT Rangkang juga mengungkapkan dalam hasil wawancara, sebagai berikut :

“Bahwa dukungan masyarakat terhadap ProKlim mulai meningkat, namun masih terdapat kendala pada tahap implementasi, terutama terkait penyediaan sarana pengelolaan sampah dan konservasi sumber daya air. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih terarah dari DLH untuk memaksimalkan potensi ProKlim di daerah tersebut”. (hasil wawancara dengan Wali Nagari Andaleh pada pukul 14.00 WIB Hari Rabu Tanggal 28 Mei 2025).

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Nagari Andaleh mulai menunjukkan peningkatan. Namun, proses implementasi masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya dalam penyediaan sarana pengelolaan sampah dan upaya konservasi sumber daya air. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi yang lebih terarah dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup agar potensi ProKlim dapat dimaksimalkan secara optimal.

Secara teoritis, pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan salah satu strategi nasional yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat. Program ini menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat, dukungan kelembagaan yang kuat, serta adanya koordinasi antar pihak dalam pelaksanaannya. Selain itu, berdasarkan teori strategi yang dikemukakan oleh Richard P. Rumelt, suatu strategi yang baik harus memiliki tiga elemen utama, yaitu diagnosis terhadap permasalahan, kebijakan penuntun sebagai arah penyelesaian, serta tindakan koheren yang terintegrasi. Dengan demikian, pelaksanaan ProKlim secara ideal seharusnya berjalan secara sistematis, terarah, serta mampu menjawab berbagai tantangan lingkungan melalui strategi yang efektif dan terkoordinasi.

Namun, secara empiris pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Nagari Andaleh Batipuh masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih belum optimal, yang ditunjukkan dengan masih adanya kebiasaan membakar sampah dan jerami pasca panen. Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan utama dalam mendukung pelaksanaan program, serta belum optimalnya sarana dan prasarana seperti bank sampah dan fasilitas konservasi sumber daya air. Partisipasi masyarakat juga belum merata, dan koordinasi antar lembaga terkait masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal pelaksanaan ProKlim secara teoritis dengan kondisi nyata di lapangan. Oleh

karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai strategi yang diterapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Nagari Andaleh Batipuh, sehingga dapat diketahui sejauh mana strategi tersebut mampu menjawab permasalahan yang ada serta meningkatkan efektivitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat nagari

Kegiatan yang terkait dengan upaya adaptasi merupakan upaya masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim yang tidak dapat dielakkan.¹⁶

Gambar 1.3 Komponen Adaptasi Pada ProKlim



Sumber: road map program kampung iklim (ProKlim) 2017

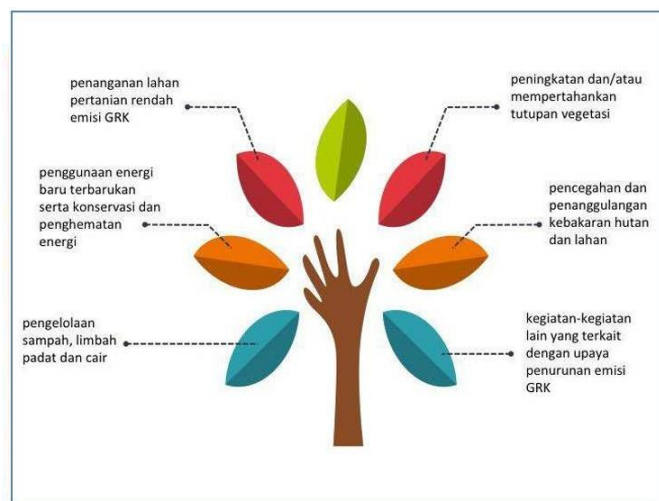
Sebagaimana pada Gambar 1.3 di atas, upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dapat dilaksanakan melalui kegiatan antara lain: (a) Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor; (b) Peningkatan ketahanan pangan; (c) Penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi; (d) Pengendalian penyakit terkait iklim;

¹⁶ Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021–2026.

dan (e) kegiatan kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim.

Pada dasarnya upaya mitigasi merupakan kegiatan pencegahan penyebab perubahan iklim sekaligus mengurangi peningkatan emisi gas rumah kaca ke atmosfer.¹⁷

Gambar 1.4 Komponen Mitigasi dalam ProKlim



Sumber: road map program kampung iklim (ProKlim) 2017

Kegiatan mitigasi di tingkat tapak dapat dimulai dari hal-hal sederhana di lingkungan sekitar rumah sampai dengan yang dilaksanakan secara berkelompok dengan melibatkan warga di lokasi kampung iklim. Perilaku hemat energi, transportasi hijau, pengelolaan sampah, penanaman pohon serta pengendalian kebakaran lahan dan hutan yang melibatkan masyarakat adalah contoh kegiatan mitigasi di tingkat tapak yang perlu terus dikampanyekan kepada seluruh pihak. Hal ini juga dijelaskan dalam kutipan wawancara oleh Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan yaitu Sofyan Ali Zumara, ST berikut :

¹⁷ Ibid hlm 15

“ Ada beberapa faktor yaitu potensi andaleh dalam adaptasi, mitigasi dan kelembagaan yang menyebabkan isian exel tinggi. Juga ada yang spesifik dengan keberadaan pohon andaleh, daerah penghasil bunga. Tetapi itu bisa digali karena ada kolaborasi (koordinasi) OPD (PERKIM dan LH), PPL Pertanian, Perangkat Nagari dan Kelompok Tani”. (hasil wawancara dengan Kepala Bidang pada pukul 11.00 WIB Hari Rabu 28 Mei 2025).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa nilai penilaian Program Kampung Iklim (ProKlim) di Nagari Andaleh tergolong tinggi karena adanya beberapa faktor pendukung. Pertama, potensi nagari dalam aspek adaptasi, mitigasi, dan kelembagaan telah berkembang dengan baik. Kedua, terdapat potensi spesifik yang menjadi keunggulan lokal, seperti keberadaan pohon andaleh yang menjadi ikon daerah serta status Nagari Andaleh sebagai daerah penghasil bunga.

Selain itu, keberhasilan tersebut juga didukung oleh adanya kolaborasi dan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PERKIM) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), perangkat nagari, dan kelompok tani. Kolaborasi ini memungkinkan pelaksanaan program berjalan lebih efektif melalui dukungan teknis, pendanaan, serta partisipasi masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat pelaksanaan strategi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan ProKlim guna meningkatkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Nagari Andaleh Batipuh Kabupaten Tanah Datar menggunakan tiga komponen utama strategi yaitu :

Pertama Diagnosis, menunjukkan bahwa Nagari Andaleh menghadapi berbagai permasalahan lingkungan, seperti kerusakan akibat aktivitas manusia

(penebangan, pembakaran jerami, penggalian) maupun faktor alam (banjir dan longsor). Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah, kebiasaan membakar jerami pascapanen cukup tinggi, serta dukungan sarana prasarana seperti bank sampah dan konservasi air masih terbatas. Selain itu, keterbatasan anggaran, partisipasi masyarakat yang belum merata, serta kelembagaan nagari dan koordinasi antar-OPD yang belum maksimal menjadi kendala utama dalam implementasi ProKlim.

Kedua kebijakan penuntun, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2025 yang memperkuat dasar pelaksanaan ProKlim. Arah kebijakan ini menekankan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi iklim, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, mendorong usulan lokasi ProKlim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk verifikasi dan penghargaan, serta membangun kolaborasi multipihak antara Dinas Perkim-LH, Dinas Pertanian, pemerintah nagari, perguruan tinggi, perusahaan melalui CSR, serta kelompok masyarakat.

Ketiga tindakan koheren, yang dilakukan mencakup beberapa langkah konkret. Pertama, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi melalui kelompok tani, PKK, karang taruna, dan perangkat nagari untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Kedua, pemberian bantuan teknis berupa bibit tanaman, sarana pengelolaan sampah, serta pengembangan teknologi ecobrick dan rumah kompos. Ketiga, pengembangan inovasi lokal melalui pembangunan Kampung Ecobrick dan Taman Literasi dengan konsep “Sedekahkan sampahmu, baca bukumu”.

Keempat, penguatan kapasitas kelembagaan nagari melalui pemetaan digital, pengelolaan website, dan pendampingan kelompok tani. Kelima, membangun kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai leading sector yang didukung oleh Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, perguruan tinggi (KKN UNP), dunia usaha (PT Semen Padang), dan masyarakat nagari. Terakhir, dilakukan monitoring dan verifikasi lapangan oleh KLHK dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup untuk memastikan keberlanjutan program.

Dengan demikian, strategi ProKlim di Nagari Andaleh tidak hanya berhenti pada identifikasi masalah, tetapi juga ditopang oleh kebijakan yang jelas serta rangkaian tindakan nyata yang koheren, sehingga mampu memperkuat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat nagari.

Berdasarkan uraian kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Nagari Andaleh Batipuh. Sebelum adanya ProKlim, pengelolaan lingkungan masih belum optimal, ditandai dengan rendahnya kesadaran masyarakat, kebiasaan membakar sampah, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Namun, setelah dilaksanakannya ProKlim, mulai terlihat adanya perubahan seperti meningkatnya partisipasi masyarakat, munculnya berbagai inovasi lingkungan, serta adanya dukungan dari berbagai pihak dalam pelaksanaan program. Meskipun demikian, perubahan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul **“Strategi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklam) Guna Meningkatkan Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim Di Nagari Andaleh Batipuh Kabupaten Tanah Datar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka muncul rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana Strategi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklam) Guna Meningkatkan Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim Di Nagari Andaleh Batipuh Kabupaten Tanah Datar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup dalam pelaksanaan program kampung iklim (proklam) guna meningkatkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Nagari Andaleh Batipuh Kabupaten Tanah Datar

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dibidang administrasi publik, manajemen lingkungan, dan perencanaan strategis pemerintahan daerah. Penelitian ini memperkaya kajian tentang penerapan teori strategi organisasi dan teori partisipasi masyarakat dalam konteks pelaksanaan Program Kampung Iklim

(ProKlim). Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji tema serupa, terutama mengenai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis masyarakat di tingkat daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan yang konstruktif bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan ProKlim. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan, koordinasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang telah berjalan, sehingga program dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat, organisasi lingkungan, serta pihak swasta dengan memberikan informasi mengenai pentingnya kolaborasi dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Dengan adanya temuan penelitian ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi contoh atau model strategi yang dapat direplikasi oleh daerah lain yang ingin mengembangkan Program Kampung Iklim berbasis partisipasi masyarakat secara lebih efektif.